



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD OEMAR**
2. Jabatan : **KEPALA SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**
3. NHK : **94002**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.384.923.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m²/160 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 675.120.000
2. Tanah Seluas 7110 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 191.970.000
3. Tanah Seluas 1750 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 180.250.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/251 m² di KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.337.583.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 5.500.000**

1. LAINNYA, POLYGON SEPEDA GUNUNG Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 200.000
2. LAINNYA, --- (SEPEDA GUNUNG) SEPEDA GUNUNG Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. LAINNYA, --- (SEPEDA LIPAT) SEPEDA LIPAT Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
4. LAINNYA, --- (SEPEDA LISTRIK) SEPEDA LISTRIK Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
5. LAINNYA, --- (SEPEDA LIPAT) SEPEDA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 975.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.329.587.003
F. HARTA LAINNYA	Rp.	340.000.000
Sub Total	Rp.	7.035.010.003
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.035.010.003

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Mei 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.